



## INTISARI

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi wisata yang menarik. Dalam rangka mendukung pembangunan kawasan selatan dengan konsep “among tani dagang layar”, terdapat rencana Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait pengembangan jaringan kereta api Bandara Kulon Progo – Parangtritis untuk melayani mobilitas masyarakat, meningkatkan perekonomian, dan mendukung pengembangan wisata. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian aspek teknis dan finansial, termasuk perhitungan pembiayaan dengan skema KPBU untuk mendukung rencana jalur kereta api Parangtritis – Bandara Internasional Yogyakarta.

Perencanaan jalur kereta api Parangtritis – Bandara Internasional Yogyakarta dilakukan sejajar dengan garis pantai selatan Jawa dan Jaringan Jalan Lintas Selatan di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo. Perencanaan aspek teknis memperhitungkan alinemen horizontal dan alinemen vertikal. Analisis biaya dan pendapatan menggunakan data Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi 2017-2036 dan berbagai penelitian terkait. Selanjutnya aspek kelayakan finansial dengan masa konsesi 50 tahun dianalisis menggunakan parameter *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), *Benefit Cost Ratio* (BCR), dan *payback period*.

Hasil analisis teknis menunjukkan bahwa kereta api Parangtritis – Bandara Internasional mempunyai panjang trase 33,8 km. Pada aspek finansial dengan suku bunga dasar kredit korporasi 9,64% dan tingkat inflasi 1,54% per tahun, skenario dengan pendanaan 100% dari badan usaha serta skenario dukungan pemerintah dengan VGF 49% tidak layak secara finansial. Kelayakan finansial didapatkan dengan skenario prasarana dimiliki pemerintah dengan badan usaha sebagai operator, harga tiket Rp 700,00/km dan tingkat keterisian moderat dengan NPV Rp 158.694.885.229,00, IRR 11,931%, BCR 1,110, dan *payback period* pada tahun ke-42 dari masa konsesi. Skema kerjasama yang dapat diterapkan adalah pemerintah selaku regulator dengan kewajiban mempersiapkan dokumen, kebijakan, dan penyediaan prasarana, sementara itu badan usaha berkewajiban menyiapkan dana dan mengelola kereta api selama masa konsesi berlangsung, serta dilaksanakan penanganan risiko bersama untuk meminimalkan risiko pelaksanaan proyek.

Kata kunci : kereta api, alinemen, kelayakan finansial, kerjasama pemerintah badan usaha